



RANCANGAN
RENCANA STRATEGI
SEKRETARIAT DAERAH
2023 - 2026





SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 telah dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra ini disusun secara simultan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi sehingga peran strategis tersebut diwujudkan dalam bentuk pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pembinaan serta pemberian dukungan administrasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang penyusunan kebijakan pemerintah daerah, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah oleh perangkat daerah. Pembinaan administrasi dan aparatur daerah, pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah, penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan pemerintah daerah, pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas dan pelaporan perangkat daerah, penyelenggaraan urusan hukum, kerja sama daerah dan protokol, fasilitasi dan pengoordinasian fungsi perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup, kesejahteraan sosial dan mental spiritual serta tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur.

Agar pelaksanaan tugas dan kegiatan seluruh unsur pelaksanaan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien, diperlukan acuan yang jelas, terukur, terarah dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel. Penyusunan Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Demikian Renstra ini disusun, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja di Lingkungan Sekretariat daerah di tahun 2023-2026

Jakarta, 8 April 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	8
a. Biro Pemerintahan	10
b. Biro Hukum	18
c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	19
d. Biro Kepala Daerah	20
e. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	21
f. Biro Kerja Sama Daerah.....	22
g. Biro Perekonomian dan Keuangan	23
h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	24
i. Biro Kesejahteraan Sosial	26
j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	29
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	29
2.1.1. Sumber Daya Manusia	30
2.1.2. Aset Modal	34
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	44
2.3.1. Capaian Indikator Kinerja	44
2.3.2. Realisasi Anggaran	57
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah	75

BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1.	Indetifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah	77
3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	84
3.3.	Telaah Rencana Strategis Sekretariat Daerah	92
3.4.	Telaah Rencana Tata Ruang	92
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	93
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH	
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah	97
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	Strategi dan Arah Kebijakan	104
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	109
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	166
BAB VIII	PENUTUP	
	Penutup	173

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Jumlah PNS di masing-masing Unit Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	30
TABEL II.2	Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia..	31
TABEL II.3	Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	33
TABEL II.4	Aset/Modal Sekretariat Daerah	34
TABEL II.5	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah	45
TABEL II.6	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah 2018-2022..	57
TABEL III.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	77
TABEL III.2	Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	89
TABEL III.3	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	92
TABEL III.4	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	93
TABEL IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	97
TABEL V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	104
TABEL VI.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah	105
TABEL VII.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD	166
GRAFIK II.1	Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia.....	32
GRAFIK II.2	Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Disamping itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 Gubernur yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) digunakan Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan selama periode empat tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat mengakomodir kebutuhan dan perkembangan di masa depan di lingkungan Sekretariat Daerah pada khususnya dan masyarakat DKI Jakarta pada umumnya.

Sekretariat Daerah yang secara struktural menjadi bagian dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 10 (sepuluh) Biro sebagai Unit Perangkat Daerah (UKPD). Selama empat tahun ke depan Sekretariat Daerah juga akan menjalankan peran dan fungsi untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan di DKI Jakarta.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dilaksanakan dengan beberapa tahap yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, sebagai berikut :

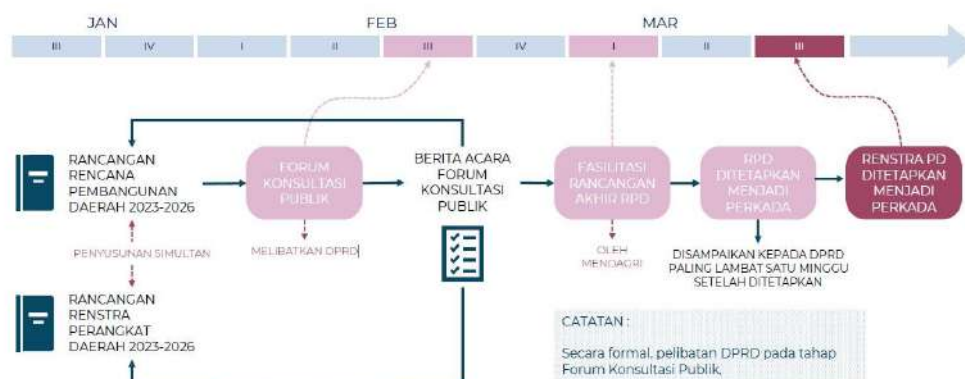
1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Sekretariat Daerah;
2. Penyusunan rancangan Renstra Sekretariat Daerah;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Sekretariat Daerah;
4. Penetapan Renstra Sekretariat Daerah.

Gambar 1.1

Bagan Alur penyusunan Renstra Sekretariat Daerah

TIMELINE DAN TAHAPAN PENYUSUNAN

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2021



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Periode 2023-2026 maka diharapkan seluruh entitas di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
17. Surat Edaran Gubernur Nomor 3/SE/2012 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Renstra Sekretariat Daerah adalah untuk menjabarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah adalah :

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah
3. Menjadi acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah
4. Sebagai bentuk kontrak kinerja antara Sekretaris Daerah dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 yaitu:

BAB I **Pendahuluan** mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah** mencakup: Sumber Daya Perangkat Daerah (SDM dan Aset/Modal), Kinerja Sekretariat Daerah (Capaian IK dan Realisasi Anggaran) dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat.

BAB III **Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV **Tujuan dan Sasaran** mencakup: Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah.

BAB V **Strategi dan Arah Kebijakan** mencakup : Merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, bab ini menyajikan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah.

BAB VI **Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan** mencakup : Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mencakup : Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditatanya Perangkat Daerah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang mengatur :

Kedudukan : Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Tugas : Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan kebijakan, pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pelayanan administratif.

Fungsi : a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah;

- b. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah;
- c. Penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Daerah;
- d. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- g. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi;
- h. Penyelenggaraan pemerintahan, hukum, organisasi, reformasi birokrasi, dan kerja sama daerah;
- i. Penyelenggaraan ketatausahaan Pemerintah Daerah;
- j. Penyelenggaraan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
- k. Pelaksanaan kesekretariatan Sekretariat Daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan
 - Biro Pemerintahan;
 - Biro Hukum;

- Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
 - Biro Kepala Daerah; dan
 - Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah.
- b. Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Biro Perekonomian dan Keuangan; dan
 - Biro Kerja Sama Daerah.
- c. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- d. Asisten Kesejahteraan Rakyat
- Biro Kesejahteraan Sosial; dan
 - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

Adapun tugas dan fungsi pada masing-masing Biro yaitu :

a. Biro Pemerintahan

Tugas dan fungsi

Mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah, serta bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan.

Biro Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;*
- 2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;*
- 3. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman,*

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;

4. *pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintahan bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan;*
5. *pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;*
6. *pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan;*
7. *pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;*
8. *pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan;*
9. *pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;*
10. *pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan bidang*

otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan;

- 11. fasilitasi Asisten Pemerintahan dalam pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah;*
- 12. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah;*
- 13. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memori serah terima jabatan Gubernur dan akhir masa jabatan;*
- 14. fasilitasi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;*
- 15. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Hari Jadi Provinsi;*
- 16. fasilitasi forum, organisasi dan/atau asosiasi pemerintah, antara lain Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia;*
- 17. pelaksanaan kesekretariatan Biro Pemerintahan;*
- 18. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Pemerintahan;*
- 19. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan; dan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Pemerintahan.*

Kelompok Substansi

1 Kelompok Substansi Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Kelompok Substansi Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah serta pengelolaan kesekretariatan Biro Pemerintahan.

Kelompok Substansi Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi :

- i. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan, kapasitas daerah, dan standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah;
- ii. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan, kapasitas daerah, dan standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah;
- iii. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan, kapasitas daerah, dan standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah;
- iv. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan, kapasitas daerah, dan standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah;
- v. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

- peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
- vi. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memori serah terima jabatan Gubernur dan akhir masa jabatan;
 - vii. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - viii. pelaksanaan fasilitasi forum, organisasi dan/atau asosiasi pemerintah, antara lain Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia;
 - ix. pengelolaan kesekretariatan Biro Pemerintahan; dan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biro

2 Kelompok Substansi Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

Kelompok Substansi Kewilayahan dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam administrasi dan perangkat kewilayahan, penataan dan pengembangan wilayah, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan umum.

Kelompok Substansi Kewilayahan dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi :

- i. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan dalam bidang pembinaan kewilayahan, penataan dan pengembangan wilayah, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan umum;
- ii. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang pembinaan kewilayahan, penataan dan

- pengembangan wilayah, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan umum;
- ii. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam dalam bidang pembinaan kewilayahan, penataan dan pengembangan wilayah, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan umum;
 - v. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan dalam bidang pembinaan kewilayahan, penataan dan pengembangan wilayah, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan umum;
 - v. pengoordinasian pelaksana tugas perangkat kewilayahan Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi di wilayahnya;
 - vi. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biro

3 Kelompok Substansi Tata Praja

Kelompok Substansi Tata Praja mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan : ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah.

Kelompok Substansi Tata Praja menyelenggarakan fungsi :

- i. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;
- ii. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;
 - iii. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;
 - iv. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;
 - v. fasilitasi Asisten Pemerintahan dalam pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - vi. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Hari Jadi Provinsi; dan
 - vii. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Biro.

4 Kelompok Substansi Pengaduan

Kelompok Substansi Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan.

Kelompok Substansi Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

- i. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan;
- ii. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan;
- iii. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan;
- iv. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan;
- v. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan pengaduan di lingkungan Balaikota;
- vi. pengoordinasian dan pengelolaan kanal pengaduan resmi daerah;
- vii. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik itu kewenangan pemerintah pusat maupun swasta;
- viii. pengoordinasian dan penyusunan laporan penanganan pengaduan;

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

b. Biro Hukum

Tugas dan fungsi

Melaksanakan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan

terkait penyusunan produk hukum daerah, pelayanan hukum bantuan hukum, publikasi dan dokumentasi hukum dan pembinaan hak asasi manusia , penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, pengoordinasian pengharmonisasian, pemantapan, pembulatan, konsepsi rancangan produk hukum daerah, dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan hukum, pengoordinasian dan pelaksanaan bantuan hukum.

Eselon III

1 Bagian Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, pengoordinasian, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah dan evaluasi dan pengkajian produk hukum daerah.

2 Bagian Pelayanan Hukum

Pelaksanaan pengoordinasian, pelayanan dan pengkajian perkara non litigasi.

3 Bagian Bantuan Hukum

Pengoordinasian, pengkajian dan pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi.

4 Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusia, Publikasi dan Dokumentasi Hukum

Pengordinasian pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dokumentasi, publikasi, sosialisasi, pengelolaan kearsipan produk hukum daerah, pengelolaan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan hak asasi manusia serta kesekretariatan Biro Hukum.

c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Tugas dan fungsi

Mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tatalaksana, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik.

Eselon III

1 Bagian Kelembagaan

Melaksanakan penyiapan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang kelembagaan PD/UKPD.

2 Bagian Analisis Jabatan

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi jabatan PD/UKPD.

3 Bagian Tatalaksana

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang ketatalaksanaan PD/UKPD, antara lain sistem dan prosedur kerja, sarana kerja dan tata ruang kerja, tata naskah dinas serta pengaturan pakaian dinas, serta pengelolaan kesekretariatan Biro.

4 Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang reformasi birokrasi, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

d. Biro Kepala Daerah

Tugas dan fungsi

Melaksanakan administrasi, keprotokolan, persidangan, pelayanan tamu Gubernur dan Wakil Gubernur, pelaksanaan ketatausahaan

Pemerintah Daerah, pelaksanaan pengetikan dan penaklukan naskah dinas pimpinan.

Eselon III

1 Bagian Administrasi Kepala Daerah

Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur dan pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan tamu Pemerintah Daerah.

2 Bagian Protokol

Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi keprotokolam dan acara Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur.

3 Bagian Persidangan

Melaksanakan pengoordinasian, penyiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rapat yang dipimpin oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; pengoordinasian dan penyusunan naskah sambutan/pidato tertulis dan/atau yang dibacakan oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta pengoordinasian penyiapan dan pelaksanaan jamuan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

4 Bagian Naskah Dinas

Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengetikan, penaklukan, penomoran dan kearsipan naskah dinas Gubernur, meliputi Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Surat Gubernur dan pengelolaan kesekretariatan Biro Kepala Daerah.

e. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

Tugas dan fungsi

Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam kompleks gedung balaikota dan rumah dinas pimpinan, pelayanan kompleks gedung balaikota, perlengkapan dan sarana acara, administrasi Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur dan

Eselon III

1 Bagian Rumah Tangga

Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan rumah tangga kompleks gedung Balaikota dan rumah dinas pimpinan.

2 Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan

Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengamanan dalam kompleks gedung Balaikota dan rumah dinas pimpinan, pelayanan penggunaan kompleks gedung Balaikota dan pengelolaan perlengkapan dan sarana acara seremonial.

3 Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur

Melaksanakan pengelolaan administrasi Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Asisten Deputi Gubernur; pengelolaan administrasi umum Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dan pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.

4 Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah

Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan anggaran, keuangan dan aset Sekretariat Daerah.

f. Biro Kerja Sama Daerah

Tugas dan fungsi

Mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kerja sama daerah baik Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitas Korps Diplomatik, Kerja Sama Luar Negeri, Kerja Sama Pihak Ketiga dan perjalanan dinas.

Eselon III

1 Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitasi Korps Diplomatik

Melaksanakan penyusunan analisis pertimbangan, monitoring dan evaluasi terhadap usulan kerja sama terhadap Pemerintah Daerah Dalam Negeri dan Lembaga Negara dan penyelenggaraan pelayanan terhadap Korps Diplomatik.

2 Bagian Kerja Sama Luar Negeri

Melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan , monitoring dan evaluasi terhadap usulan kerja sama terhadap Pemerintah Daerah Luar Negeri, Organisasi Internasional dan lembaga di luar negeri.

3 Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga

Melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan, monitoring dan evaluasi terhadap usulan kerja sama dengan perseorangan, lembaga lain, perguruan tinggi, yayasan dan badan usaha berbadan hukum.

4 Bagian Perjalanan Dinas

Mengordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perjalanan dinas dan pengelolaan kesekretariatan Biro Kerja Sama Daerah.

g. Biro Perekonomian dan Keuangan

Tugas dan fungsi

Mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi, penanaman modal, pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, dan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Eselon III

1 Bagian Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah.

2 Bagian Perhubungan, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang energi baru terbarukan dan sub urusan bidang ketenagalistrikan), penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

3 Bagian Pangan dan Ekonomi Daerah

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan bidang ekonomi daerah (mikro dan makro) dan pengelolaan kesekretariatan Biro Perekonomian dan Keuangan.

4 Bagian Keuangan Daerah

Memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Tugas dan fungsi

Mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi, permukiman, persampahan), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan dan penyelenggaraan penerangan jalan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur transportasi.

Eselon III

1 Bagian Pekerjaan Umum

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) dan penyelenggaraan penerangan jalan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur transportasi.

2 Bagian Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan permukiman),

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan penyelenggaraan penataan kawasan.

3 Bagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan dan air limbah), lingkungan hidup, kehutanan dan penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman dan bidang mitigasi adaptasi bencana iklim.

4 Bagian Pembangunan Kota

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam pemantauan program pembangunan, pemantauan fasilitas sosial dan fasilitas umum, penyelesaian pemenuhan kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jasa konstruksi) serta pengelolaan kesekretariatan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

i. Biro Kesejahteraan Sosial

Tugas dan fungsi

Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga.

Biro Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja

- dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;*
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;*
 - c. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga;*
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga;*
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga;*
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga;*
 - g. pelaksanaan kesekretariatan Biro Kesejahteraan Sosial;*
 - h. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kesejahteraan Sosial*
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial; dan*
 - j. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Kesejahteraan Rakyat*
 - 1. Koordinator Kelompok Substansi Kesehatan*
Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) *Pengoordinasikan, perumusan, dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;*
- 2) *Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;*
- 3) *Pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;*
- 4) *Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan*
- 5) *Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Biro*

2. *Koordinator Kelompok Substansi Sosial, Kepemudaan dan Olahraga*

Menyelenggarakan Fungsi :

1. *Pengoordinasikan, perumusan, dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, kepemudaan dan olahraga;*
2. *Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, kepemudaan dan olahraga;*
3. *Pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, kepemudaan dan olahraga;*
4. *Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, kepemudaan dan olahraga; dan*
5. *Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Biro*

3. *Koordinator Kelompok Substansi pemberdayaan*

perlindungan anak, dan pengendalian penduduk

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1. Pengoordinasikan, perumusan, dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;*
- 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;*
- 3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;*
- 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk; dan*

Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Biro

j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

Tugas dan fungsi

Mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan serta bidang mental spiritual

Eselon III

1 Bagian Pendidikan

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

2 Bagian Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, pelaksanaan kesekretariatan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

3 Bagian Mental Spiritual

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan mental spiritual.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas tersebut Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung yang terdiri dari :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut didukung dengan jumlah personil Pegawai Negeri Sipil dan non PNS adapun masing-masing data berdasarkan usia pegawai, tingkat pendidikan dan distribusi masing-masing unit perangkat daerah.

Tabel II.1
Jumlah PNS di masing-masing Unit Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah

PD	NAMA BIRO	PNS	PHL	KETERANGAN
Sekretariat Daerah		659	480	
	Sekretaris Daerah	1		
	Asisten			
	1. Asisten Pemerintahan	1		
	➤ Biro Pemerintahan	38	-	4 Kelompok Substansi, 10 Kelompok Sub Substansi dan 2 Subbagian
	➤ Biro Hukum	59	3	4 Bagian dan 12

				Subbagian
	➤ Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	45	-	4 Bagian dan 12 Subbagian
	➤ Biro Kepala Daerah	114	14	4 Bagian dan 12 Subbagian
	➤ Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	147	456	4 Bagian dan 12 Subbagian
	2. Asisten Perekonomian dan Keuangan	1		
	➤ Biro Perekonomian dan Keuangan	48	-	4 Bagian dan 12 Subbagian
	➤ Biro Kerja Sama Daerah	54	4	4 Bagian dan 4 Subbagian dan 8 Sub Koordinator
	3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1		
	➤ Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	52	3	4 Bagian dan 12 Subbagian
	4. Asisten Kesejahteraan Rakyat	1		
	➤ Biro Kesejahteraan Sosial	30	-	3 Koordinator, 8 Sub Koordinator dan 1 Subbag TU
	➤ Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	43	-	3 Bagian dan 9 Subbagian

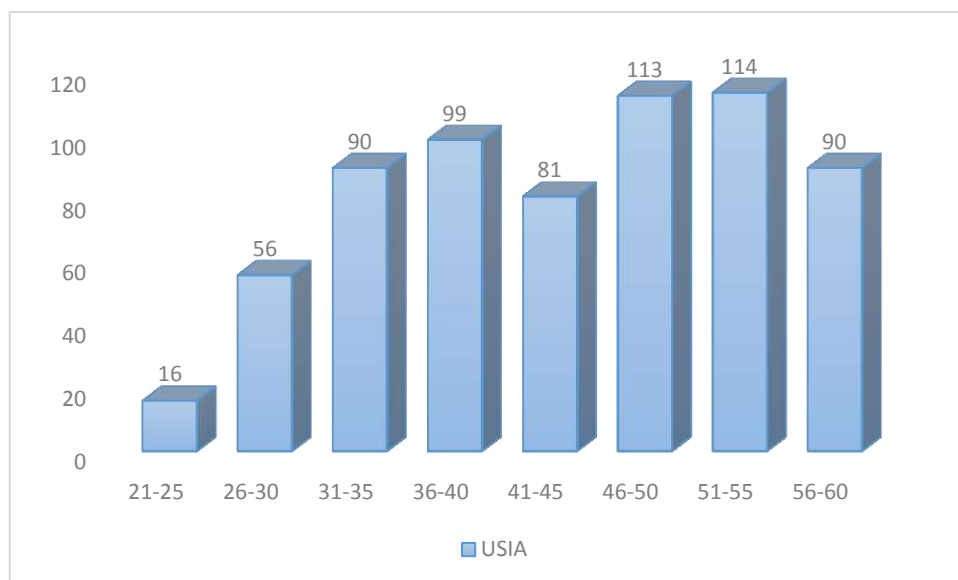
*Data pegawai per 31 Desember 2021

Tabel II.2
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia

No	Nama Biro	U S I A
----	-----------	---------

		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60
1	Biro Pemerintahan	4	5	10	3	2	6	4	2
2	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1	6	8	7	7	7	7	2
3	Biro Hukum	0	4	18	11	10	7	7	2
4	Biro Kepala Daerah	6	29	11	26	6	13	13	11
5	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	9	12	8	19	22	32	26	19
6	Biro Kerjasama Daerah	4	6	7	13	8	5	7	5
7	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	0	0	14	10	9	8	5	3
8	Biro Perekonomian dan keuangan	3	6	6	8	2	10	9	5
9	Biro Kesejahteraan Sosial	0	2	7	5	0	4	7	5
10	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	0	0	1	5	7	12	11	6
Jumlah Pegawai		27	70	90	107	73	104	96	60

Grafik II.1
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia

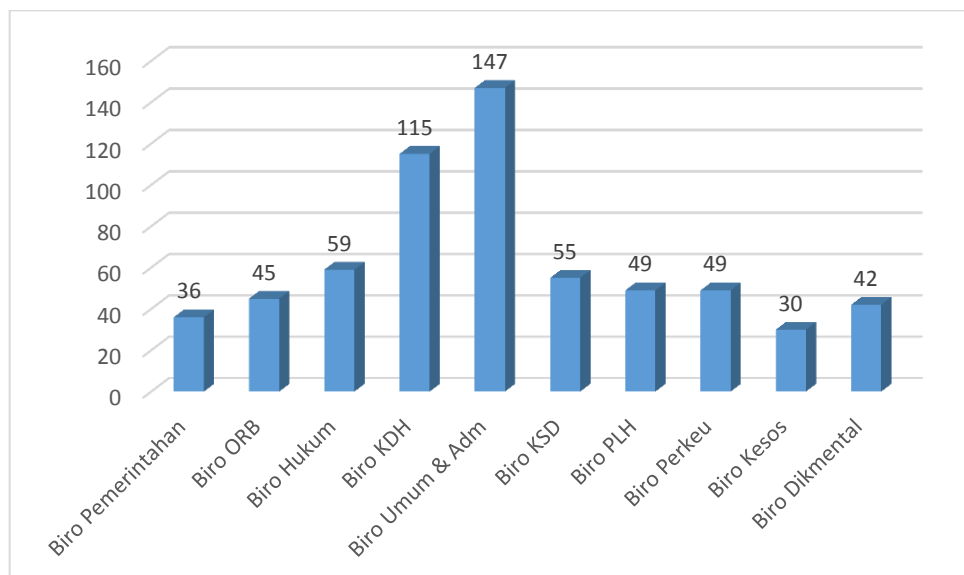


Tabel II.3
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

No	Nama Biro	P E N D I D I K A N						
		SD	SLTP	SLTA	D3	D4 / SI	S2	S3
1	Biro Pemerintahan	0	5	2	0	18	11	0
2	Biro Oraganisasi dan Reformasi Birokrasi	0	0	1	4	30	10	0
3	Biro Hukum	0	0	2	1	42	13	1
4	Biro Kepala Daerah	0	4	26	14	62	9	0
5	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	0	2	65	13	58	11	0
6	Biro Kerjasama Daerah	0	0	7	4	4	23	17
7	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	0	0	3	3	22	21	0

No	Nama Biro	P E N D I D I K A N						
		SD	SLTP	SLTA	D3	D4 / SI	S2	S3
8	Biro Perekonomian dan keuangan	0	0	9	10	15	15	0
9	Biro Kesejahteraan Sosial	0	1	3	2	18	5	1
10	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	0	0	10	3	22	7	0
Jumlah Pegawai		0	12	128	54	291	125	19

Grafik II.2
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan



2.1.2 Aset/Modal

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai aset sebesar Rp.1.166.067.042.198,00 untuk aset tetap dan

Rp.1.451.816.037,00 untuk aset lain-lain yang didistribusi ke masing-masing unit perangkat daerah yang dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel II.4
Aset/Modal Sekretariat Daerah

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Aset Tetap	1.166.067.042.193	
	Aset Lain- lain	1.451.816.037	
BIRO PEMERINTAHAN			
I	ASET TETAP	(437.308.943)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	2.226.352.562	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	-	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.630.004.689)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.630.004.689)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah Aset Tetap	596.347.873	
II	ASET LAINNYA	9.960.000	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	193.552.282	
	Aset Tetap - Rusak Berat	129.095.382	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	64.456.900	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(190.232.282)	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(125.775.382)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(64.456.900)	
	Jumlah Aset Lainnya	3.320.000	
BIRO HUKUM			
I	ASET TETAP	(599.866.382)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	2.486.351.378	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	97.474.275	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.922.505.896)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.922.505.896)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah Aset Tetap	661.319.757	
II	ASET LAINNYA	2.700.000	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	77.235.375	
	Aset Tetap - Rusak Berat	77.235.375	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(76.335.375)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(76.335.375)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Jumlah Aset Lainnya	900.000	
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI			
I	ASET TETAP	(3.132.568.747)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	4.122.279.414	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	167.354.353	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.903.945.427)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.742.321.074)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(161.624.353)	
	Jumlah Aset Tetap	385.688.340	
II	ASET LAINNYA	0	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	75.369.450	
	Aset Tetap - Rusak Berat	75.369.450	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(75.369.450)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(75.369.450)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
BIRO KEPALA DAERAH			
I	ASET TETAP	(6.106.663.494)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	16.966.586.545	
	Gedung dan Bangunan	-	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	175.796.555	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.624.523.297)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.624.523.297)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah Aset Tetap	5.517.859.803	
II	ASET LAINNYA	62.336.100	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	680.189.284	
	Aset Tetap - Rusak Berat	361.587.490	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	318.601.794	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(659.410.584)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(340.808.790)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(318.601.794)	
	Jumlah Aset Lainnya	20.778.700	
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH			
I	ASET TETAP	1.182.340.227.603	
	Tanah	468.512.780.000	
	Peralatan dan Mesin	80.099.585.114	
	Gedung dan Bangunan	695.886.616.548	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.268.530.332	
	Aset Tetap Lainnya	125.596.240	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(443.148.662.955)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(69.045.647.241)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(369.998.653.150)	
	Akumulasi Penyusutan	(3.978.766.324)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(125.596.240)	
	Jumlah Aset Tetap	812.744.445.279	
II	ASET LAINNYA	1.339.406.517	
	Aset Tidak Berwujud	58.419.278	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	58.419.278	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(58.419.278)	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(58.419.278)	
	Aset Lain-lain	46.778.395.063	
	Aset Tetap - Rusak Berat	45.927.726.619	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	850.668.444	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(46.331.926.224)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(45.482.449.415)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(849.476.809)	
	Jumlah Aset Lainnya	446.468.839	
BIRO KERJASAMA DAERAH			
I	ASET TETAP	(1.990.744.784)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	3.195.441.206	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	-	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.793.875.732)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.793.875.732)	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah Aset Tetap	401.565.474	
II	ASET LAINNYA	9.634.800	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	62.097.000	
	Aset Tetap - Rusak Berat	62.097.000	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(58.885.400)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(58.885.400)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Jumlah Aset Lainnya	3.211.600	
BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN			
I	ASET TETAP	(587.603.967)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	2.081.967.195	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	-	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.583.846.119)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.583.846.119)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah Aset Tetap	498.121.076	
II	ASET LAINNYA	7.938.906	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	135.251.242	
	Aset Tetap - Rusak Berat	135.251.242	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(132.604.940)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(132.604.940)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Jumlah Aset Lainnya	2.646.302	
BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
I	ASET TETAP	(1.593.788.967)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	2.118.568.248	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	60.412.152	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.983.916.589)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.963.200.249)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(20.716.340)	
	Jumlah Aset Tetap	195.063.811	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
II	ASET LAINNYA	27.478.620	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	460.688.210	
	Aset Tetap - Rusak Berat	460.688.210	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(451.528.670)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(451.528.670)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Jumlah Aset Lainnya	9.159.540	
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL			
I	ASET TETAP	(597.467.513)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	1.621.439.813	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	-	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.280.115.713)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.280.115.713)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah Aset Tetap	341.324.100	
II	ASET LAINNYA	0	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	68.055.214	
	Aset Tetap - Rusak Berat	68.055.214	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(68.055.214)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(68.055.214)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL			
I	ASET TETAP	(1.227.172.613)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	2.419.308.113	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	-	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.021.929.613)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.021.929.613)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah Aset Tetap	397.378.500	
II	ASET LAINNYA	300.000	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	109.348.756	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Aset Tetap - Rusak Berat	109.348.756	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(109.248.756)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(109.248.756)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Jumlah Aset Lainnya	100.000	

*Sumber : Biro Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021
(Unreview)

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam subbab ini Sekretariat Daerah menjelaskan kondisi eksisting dan tahun-tahun sebelumnya mengenai data capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah.

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah pada periode Tahun 2017-2022 dijabarkan pada tabel 2.3.1

Tabel II.5
Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup												
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	68	73	75	85	91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Skor EKPPD	Nilai	N/A	3,1	3,15	3,2	3,25	N/A	3,1045	3,1712	3,2374	N/A
Meningkatnya Efektivitas Pemerintahan Lingkup Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian perumusan kebijakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persen	N/A	N/A	N/A	100	91	N/A	N/A	N/A	91.36	90.69
Biro Perekonomian dan Keuangan												
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Skor EKPPD	Nilai	3,1	3,15	3,2374	3,25	3,3	3,1712	0	3,24	0	0
	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	0	0	100	91	91	0	0	100	91	96,45
Biro Kepala Daerah												
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	keprotokolan dan administrasi Pimpinan Daerah Indeks kepuasan pelayanan	Nilai	0	3.2	3.5	3.5	3.7	0	0	3.95	4	4

<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis</p>	<p>indeks kepuasan pelayanan kantor</p>	<p>Nilai</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>
<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis</p>	<p>indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional</p>	<p>Nilai</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>
<p>Biro Umum dan Sekretariat Daerah</p>												

Peningkatan Kepuasan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Komplek Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan	Skala 1,00 – 4,00		3,65	3,67	3,70			3,65	3,67	3,70	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Memfasilitasi PD/UPD, Deputi dan Asisten Deputi di Lingkungan Kompleks Perkantoran Balaikota dan Rumah Dinas	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan	Nilai					4					4
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual												

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan	n Kebijaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan	n Kebijaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan mental spiritual	Persen	-	82	85	85	85	-	-	93,81	91,23	86
Biro Kesejahteraan Sosial												

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Jumlah Kebijakan Bidang Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan, Perlindungan anak dan pengendalian Penduduk	Laporan	13	13	13	13	13	16	25	22	27	34
	Jumlah Ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Ketidaksesuaian antara Kebijakan dan peraturan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	68	73	75	85	91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Skor EKPPD	Nilai	N/A	3,1	3,15	3,2	3,25	N/A	3,1045	3,1712	3,2374	N/A
Meningkatnya Efektivitas Pemerintahan Lingkup Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian perumusan kebijakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persen	N/A	N/A	N/A	100	91	N/A	N/A	N/A	91.36	90.69
Biro Perekonomian dan Keuangan												

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Skor EKPPD	Nilai	3,1	3,15	3,2374	3,25	3,3	3,1712	0	3,24	0	0
	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	0	0	100	91	91	0	0	100	91	96,45
Biro Kepala Daerah												
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	keprotokolan dan administrasi Pimpinan Daerah Indeks kepuasan pelayanan	Nilai	0	3.2	3.5	3.5	3.7	0	0	3.95	4	4

<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis</p>	<p>indeks kepuasan pelayanan kantor</p>	<p>Nilai</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>
<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis</p>	<p>indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional</p>	<p>Nilai</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>
<p>Biro Umum dan Sekretariat Daerah</p>													

<p>Peningkatan Kepuasan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan</p>	<p>Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Komplek Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan</p>	<p>Skala 1,00 – 4,00</p>		<p>3,65</p>	<p>3,67</p>	<p>3,70</p>			<p>3,65</p>	<p>3,67</p>	<p>3,70</p>	
<p>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Memfasilitasi PD/UPD, Deputi dan Asisten Deputi di Lingkungan Kompleks Perkantoran Balaikota dan Rumah Dinas</p>	<p>Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan</p>	<p>Nilai</p>					<p>4</p>					<p>4</p>
<p>Biro Pendidikan dan Mental Spiritual</p>												

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan	n Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan	n Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan mental spiritual	Persen	-	82	85	85	85	-	-	93,81	91,23	86
Biro Kesejahteraan Sosial												

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Jumlah Kebijakan Bidang Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan, Perlindungan anak dan pengendalian Penduduk	Laporan	13	13	13	13	13	16	25	22	27	34
	Jumlah Ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Ketidaksesuaian antara Kebijakan dan peraturan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah pada periode Tahun 2017-2022, terdapat pada tabel 2.3.2.

Pada data realisasi anggaran terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai Pergub 150 Tahun 2019 maka dalam penyusunan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah terdapat perubahan pada tahun 2020. Adapun rincian penyerapan anggaran pada setiap Biro berdasarkan Program Kegiatan.

Tabel II.6
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah 2018- 2022

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
BIRO TATA PEMERINTAHAN												
Peningkatan Kerjasama Antar Daerah		2.272.793.526				2.120.470.962				93%		
Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah	368.610.066	1.814.889.603			368.593.088	1.597.221.049			100%	88%		
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	117.900.000	128.350.000			117.841.500	124.443.750			100%	97%		

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Tata Pemerintahan	711.263.059	641.052.068			608.890.483	538.413.377			86%	84%		
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan	3.021.405.595				2.740.695.260				91%			
BIRO PEMERINTAHAN												
Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah			284.745.500				262.045.500				92%	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				2.661.162.105				2.580.379.317				97%
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja			14.922.100				14.922.100				100%	

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Tata Pemerintahan			142.057.471				132.592.632				93%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				545.977.738				480.012.470				88%
BIRO HUKUM												
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				1.008.639.374				874.896.868				87%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				78.600.000				74.000.000				94%
Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	199.350.000	443.300.000	20.000.000		180.130.000	420.844.000	20.000.000		90%	95%	100%	

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI				10.000.000				10.000.000				100%
Program Peningkatan Bantuan - Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara	3.791.174.169	4.798.040.539			3.163.017.737	4.101.138.739			83%	85%		
Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara			1.135.281.399				1.132.297.703				100%	
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Hukum	812.725.758	1.321.582.081	341.460.700		703.143.248	1.162.581.786	341.312.900		87%	88%	100%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				234.366.200				227.313.200				97%

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROVINSI												
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI												
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Jabatan Aparatur		1.649.398.297	670.985.000			1.473.605.250	665.985.000			89%	99%	
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur	533.109.500				510.984.500				96%			
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				345.300.000				345.300.000				100%
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	525.046.047	473.126.777	138.293.073		496.717.525	452.027.500	126.837.955		95%	96%	92%	

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		109.320.800	6.085.000			86.095.000	6.085.000			79%	100%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				131.905.507				103.437.750				78%
BIRO KEPALA DAERAH												
Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah			5.725.491.661				5.113.146.205					89%
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri			944.859.751				935.275.847					99%

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri			869.308.951				748.208.439				86%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.488.672.160				9.152.641.809				96%
BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI												
Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah	14.530.968.476	14.491.101.561			12.700.313.831	12.474.061.036			87%	86%		

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	1.071.697.100	839.397.373			929.460.061	622.463.692			87%	74%		
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	1.732.847.011	1.468.101.543			1.353.968.561	1.201.799.748			78%	82%		
Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri	505.484.500	881.923.700			407.896.478	658.372.379			81%	75%		
BIRO ADMINISTRASI SETDA												

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa		260.266.598				240.142.000				92%		
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Administrasi Sekretariat Daerah	1.432.814.166	1.249.484.737			793.364.573	941.550.675			55%	75%		
Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas	54.585.470.000	105.853.126.500			54.351.423.410	82.670.548.058			100%	78%		
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Administrasi Sekretariat Daerah	32.910.473.051	35.025.873.897			27.350.472.442	31.352.652.370			83%	90%		
BIRO UMUM												

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah	30.094.753.802	50.780.236.372			26.672.427.117	44.685.290.656			89%	88%		
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum	21.489.060.602	15.945.431.517			18.485.603.661	13.497.236.743			86%	85%		
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH												
Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah			40.103.115.575				38.817.982.382				97%	
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Administrasi Sekretariat Daerah			1.207.107.977				668.292.575				55%	

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Administrasi Sekretariat Daerah			3.552.605.441				2.257.772.492				64%	
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum			27.168.233.522				23.574.489.634				87%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				772.585.809.867				757.389.212.306				98%
BIRO KERJASAMA DAERAH												
Peningkatan Kerjasama Antar Daerah			145.750.000				121.038.000				83%	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				362.804.188				338.295.787				93%

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				3.455.428.000				3.206.465.265				93%
Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas			18.000.984.000				1.828.612.720				10%	
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri			635.048.535				505.150.986				80%	
Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri			322.491.700				298.809.919				93%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				519.698.756				404.681.319				78%
BIRO PEREKONOMIAN												

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian	365.000.000	1.155.417.600			355.692.692	1.124.021.357			97%	97%		
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Perekonomian	950.283.244	1.306.336.462			845.732.357	1.171.013.015			89%	90%		
BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN												
Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian			5.600.000				5.600.000				100%	
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Perekonomian			265.428.178				260.794.654				98%	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				-				-				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				215.010.584				187.264.700				87%

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROVINSI												
BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Program Koordinasi Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	113.099.500	217.317.400			110.139.060	197.960.000			97%	91%		
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	1.029.092.823	1.203.156.910			969.887.905	1.116.301.139			94%	93%		
BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Program Koordinasi Penataan Kota dan Lingkungan Hidup			57.525.000				23.925.000				42%	

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup			580.641.806				506.708.318				87%	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				1.776.713.226				1.776.413.226				100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				440.112.824				409.924.593				93%
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL												
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				4.200.000				4.200.000				100%

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	356.920.000	576.625.000			355.832.000	511.205.000			100%	89%		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				165.800.000				165.800.000				100%
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kesejahteraan Sosial	420.987.285	472.599.041	54.496.415		369.003.825	407.796.895	53.616.835		88%	86%	98%	

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				62.366.100				50.344.700				81%
BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL												
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				232.945.224.189				227.921.433.589				98%
Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, serta Mental Spiritual	324.115.000	220.550.000			297.676.500	189.410.000			92%	86%		
Program Pengelolaan, Pengawasan dan Pembinaan Mental Spiritual	7.815.475.964				7.639.617.736				98%			

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	287.720.251	498.659.105	57.644.480		278.280.313	447.380.705	49.298.725		97%	90%	86%	
Program Peningkatan Layanan Mental Spiritual		8.369.882.954	28.620.000			8.286.487.854	28.620.000			99%	100%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				67.524.055				54.370.985				81%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam merumuskan rencana strategi Sekretariat Daerah perlu memperhatikan dinamika lingkungan strategis, tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan semakin kompleks di masa depan. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Daerah dalam hal ini khususnya Sekretariat Daerah menuntut adanya peningkatan peran, kewenangan dan koordinasi dalam menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah. Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, antara lain adalah:

1. Tantangan

a. Pandemi COVID

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia termasuk DKI Jakarta sangat banyak mempengaruhi pola hidup dan pola berfikir masyarakat pada berbagai bidang. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja pegawai dan pelayanan di semua lini. Untuk menghadapi masalah tersebut maka Sekretariat Daerah membuat transformasi digital di segala aspek agar pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik dan bisa mengakomodir kebutuhan pegawai pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

b. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang cukup luas, meliputi pengoordinasian seluruh SKPD dibawah koordinasi biro-biro sesuai pembedangan Asisten Sekda maka dalam hal ini Sekretariat Daerah yang terdiri dari sepuluh biro meningkatkan koordinasi dengan mengoptimalkan perangkat infomasi dan komunikasi.

- c. Sekretariat Daerah harus dapat bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dengan membangun Tim dan Kemitraan yang efektif sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengarah kepada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kerja oleh setiap UKPD di Sekretariat Daerah sesuai pembedangan Asisten Sekda.

2. Peluang (Opportunity)

- a. Sekretariat Daerah merupakan potret dari Pemerintah Provinsi DKI dalam menciptakan gagasan, pembaharuan untuk meningkatkan pelayanan melalui evaluasi pemecahan masalah. Komitmen Gubernur untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik sehingga Sekretariat memiliki kesempatan untuk memberikan contoh dalam melaksanakan pelayanan di berbagai sektor dengan mengikuti kemajuan jaman khususnya dalam bidang teknologi Informasi.
- b. Kesekretariat menjadi percontohan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan dalam berbagai lini dalam hal ini Sekretariat Daerah menjadikan e-Office sebagai contoh dalam kegiatan administrasi Sekretariat Daerah, selain itu penggunaan akun.jakarta.go.id menjadikan contoh transparansi dalam hal perencanaan dan penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah provinsi DKI Jakarta.
- c. Semangat pimpinan untuk mengadakan perubahan dalam hal ini Sekretaris Daerah beserta jajarannya menjadikan Teknologi Informasi sebagai media untuk mensosialisaikan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Gubernur terpilih, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
Biro Pemerintahan			
1	inisiasi Kebijakan	inisiasi Kebijakan	ada kebijakan yang belum disesuaikan/diperbarui /direvisi sesuai dengan kondisi saat ini dengan dinamika yang cepat
2		ediaan Data	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Pemerintahan yang tersedia belum lengkap ▪ Koordinasi dengan Perangkat Daerah internal Pemprov DKI Jakarta perlu ditingkatkan terkait data
3	er Daya Manusia	terdapat daya dukung dari Personil yang ada dalam mencapai tugas dan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya capaian kinerja pegawai yang terukur dalam mendukung capaian Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ▪ Rekrutmen pegawai belum memenuhi jumlah dan kompetensi pegawai yang dibutuhkan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
Biro Hukum			
	nihil	nihil	nihil
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			
1	Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah belum optimal	SDM kurang, baik segi kualitas maupun kuantitas	
		Prasarana dan Sarana Kerja belum memadai	Belum semua SKPD memiliki Standar Peralatan Kerja Teknis
			Belum adanya pedoman terkait sarana dan prasarana PD/UPD
			Kurangnya koordinasi internal PD/UPD terkait pengadaan prasarana dan sarana kerja
			Perkembangan teknologi yang terlalu cepat
		Penataan kelembagaan masih berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan daerah	PD/UPD masih melaksanakan tugas fungsi berdasarkan kebiasaan bukan berdasarkan pergub OTK
Biro Kepala Daerah			
1	Meningkatnya frekuensi dan kompleksitas acara Pimpinan Daerah dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan jumlah tamu dan jamuan makan	Waktu yang terbatas dan lemahnya koordinasi terkait acara dan jumlah tamu
2	Meningkatnya jumlah surat masuk yang ditujukan kepada pimpinan daerah	Perlunya sistem yang andal dan terintegrasi ke seluruh SKPD/UKPD	Masih butuh pengembangan sistem yang ada guna mencapai pelayanan publik yang baik
3	Terdapatnya kelemahan dalam koordinasi dan komunikasi	Lemahnya koordinasi antar fungsi terkait	Penguatan koordinasi
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah			
1	Layanan Kerumahtanggaan (bangunan gedung, jaringan listrik, jaringan air dan telekomunikasi)	1. Adanya persepsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain bahwa Biro UAS adalah OPD yang menyediakan seluruh fasilitas sarana dan	1. Belum terintegrasinya aplikasi layanan 2. Waktu penyelesaian keluhan atas layanan kerumahtanggaan yang belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		<p>prasarana, perlengkapan dan pelayanan rumah tangga dalam kegiatan OPD sehingga mengalih tugaskan pekerjaan yang sebenarnya bisa dianggarkan sendiri</p> <p>2. Layanan yang beririsan dengan OPD lain (contohnya renovasi bangunan yang beririsan dengan dinas CKTRP)</p> <p>3. Kurang kompetennya sumber daya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kerumah tanggaan</p> <p>4. Keluhan terhadap pelayanan kerumah tanggaan belum dapat ditangani secara realtime oleh petugas</p> <p>5. Masih belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung layanan (peralatan perawatan bangunan)</p> <p>6. Masih belum terakomodirnya anggaran untuk kebutuhan layanan kerumahtanggaan</p> <p>7. Perlunya pengaplikasian konsep smart building dan Robotic Process</p>	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Automation (building automation system)	
2	Layanan Pengamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang kompetennya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pengamanan 2. Masih adanya pengunjung balaikota yang tidak tertib atau tidak mematuhi SOP keamanan 3. Masih belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung layanan keamanan 4. Masih belum terakomodirnya anggaran untuk kebutuhan layanan pengamanan 5. Perlunya pengaplikasian konsep smart building dan Robotic Process Automation (smart security system) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya pelayanan prima petugas pengamanan 2. Bagi Aparat polisi dan TNI yang bertugas di balaikota dan harus menitipkan peralatan senjata api, biro umum di subbag pengamanan belum dapat memfasilitasi safety box senjata api
3	Layanan Perlengkapan Sarana Acara Pimpinan dan Pelayanan Balaikota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya persepsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain bahwa Biro UAS adalah OPD yang menyediakan seluruh fasilitas sarana dan prasarana acara pimpinan serta ruang kerja, sarana kerja dalam kegiatan OPD sehingga mengalih tugaskan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana dalam menyediakan perlengkapan dan sarana acara pimpinan sesuai kebutuhan 2. Waktu layanan tidak fleksibel akibat tidak tersedianya anggaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		<p>pekerjaan yang sebenarnya bisa dianggarkan sendiri.</p> <p>2. Layanan yang beririsan dengan OPD lain (contohnya acara rutin OPD, fasilitas kerja di ruangan masing-masing OPD)</p> <p>3. Kurang kompetennya sumber daya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perlengkapan sarana acara pimpinan dan pelayanan balaikota)</p> <p>4. Masih belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung layanan (peralatan sarana acara dan pelayanan ruangan)</p> <p>5. Masih belum terakomodirnya anggaran untuk kebutuhan perlengkapan, layanan sarana acara dan pelayanan ruangan</p> <p>6. Perlunya pengaplikasian konsep smart building dan Robotic Process Automation</p> <p>7. Permohonan Penjadwalan acara dan penggunaan</p>	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		perlengkapan acara yang bersamaan	
4	Layanan Administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Deputi Gubernur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasinya jadwal pimpinan 2. Adanya persepsi bahwa Biro UAS adalah OPD yang menyediakan seluruh fasilitas sarana dan prasarana, perlengkapan, pengelolaan administrasi dalam kegiatan OPD, Surat perbal yang sering kali mendesak tenggat waktunya, Pengelolaan waktu yang belum efisien oleh pamaraf perbal, Pengantar perbal bukan ASN yang mengerti konsep perbal 3. Adanya individu dari OPD yang belum menaati prosedur administrasi, Kurang kompetennya sumber daya personil 4. Surat masuk yang diterima pada e-Office belum sepenuhnya diproses realtime oleh operator, Belum lengkap fitur statistik (laporan) di e-Office, Ketika input tembusan surat dalam sistem e-Office terjadi double inputan, Proses pencarian kata kunci surat pada e-office 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu perbal pada pimpinan singkat 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses administrasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		<p>belum maksimal(harus menyertakan penulisan objek surat secara lengkap</p> <p>5. Lamanya update nama pejabat dalam database e-office</p>	
Biro Kerja Sama Daerah			
1	Sumber Daya Manusia	Kurang SDM serta pendidikan pegawai belum sesuai kebutuhan/persyaratan	Belum ada penambahan personil/pegawai
Biro Perekonomian dan Keuangan			
1	Harmonisasi Kebijakan	Inventarisasi Kebijakan	Masih ada kebijakan yang tidak sesuai kondisi eksisting. Belum disesuaikan/di update/revisi dengan kondisi saat ini
2	Data	Ketersediaan Data	Data mikro ekonomi belum lengkap tersedia.
			Koordinasi dengan SKPD lain perlu ditingkatkan terkait data
3	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM, Banyak yang masuk masa purna bhakti - Pendidikan Pegawai belum sesuai kebutuhan/persyaratan 	Tidak ada rekrutmen dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup			
1	Sumber Daya Manusia	Kurangnya jumlah SDM	Terbatasnya jumlah kuota Anjab dan ABK
Biro Kesejahteraan Sosial			
1	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang SDM (Setiap tahun ada pegawai yg pensiun) <p>Kurang peningkatan kompetensi Pegawai (Diklat Pegawai masih Kurang)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan pegawai tidak sebanding dengan pegawai yang pensiun dan mutasi karena promosi jabatan. <p>Kurangnya diklat untuk seluruh pegawai.</p>
2	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Kerja belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan Sarana Kerja perlu di tambah Sarana computer sudah banyak yang rusak, perlu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			peremajaan sarana.
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual			
1	Data	Ketersediaan Data	Belum memiliki Sistem berbasis digitalisasi layanan mental spiritual
2	Pembangunan mental spiritual	Peran tokoh agama	Penguatan peran tokoh agama dalam pembangunan mental spiritual
3	Pemberdayaan umat	Peran lembaga mental spiritual	Peran lembaga mental spiritual dan rumah ibadah untuk pemberdayaan umat
4	Membangun peradaban	Integrasi pendidikan dan kebudayaan	Integrasi pendidikan dan kebudayaan dalam membangun peradaban pada generasi muda yang berbudaya
5	Kebijakan	Fungsi koordinasi	Penguatan fungsi koordinasi dalam penyusunan kebijakan

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN RPJPD TAHUN 2005-2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, maka visi dan misi dalam RPJPD tahun 2005-2025 adalah:

Visi:

“Jakarta : Ibukota Negara Kesatuan Republik I yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Global”.

Misi:

1. Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung

jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, sertainpusat/perwakilan lembaga internasional.

2. Jakarta yang aman bermakna terciptanya kehidupan yang tertib, tentram, damai dan mampu mengatasi ancaman bencana alam, cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
3. memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai social budaya dan fungsinya sebagai manusia.
4. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik dimana masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, damai dan memiliki keseimbangan lahir dan batin.
5. Jakarta yang produktif bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan hasil dan manfaat serta nilai tambah yang secara ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota.
6. Jakarta yang berkelanjutan bermakna terwujudnya proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keutuhan, kelestarian, keasrian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Jakarta yang berdaya saing global bermakna terbangunnya kemampuan dan kapasitas daerah yang mampu bersaing dalam peningkatan standar kehidupan warganya, pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan pelayanan yang luas dan berkualitas.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan: i) tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, ii) kepemimpinan daerah (leadership) yang dapat menjadi panutan, visioner, kreatif dan memiliki komitmen untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat, dan iii) kerjasama, koordinasi dan kebersamaan diantara pemangku kepentingan.

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut:

Misi Satu : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah difokuskan pada: prasarana dan sarana transportasi, drainase perkotaan, persampahan, pengolahan limbah, sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, air bersih, perumahan, permukiman, telematika dan sarana sosial dan ekonomi.

Misi Dua : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pengembangan dan penguatan perekonomian difokuskan pada: struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, perijinan usaha yang efektif dan efisien, laju inflasi yang terkendali dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Misi Tiga : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan social budaya multikultur sesuai

dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial budaya difokuskan pada: perwujudan kesejahteraan social masyarakat, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan anak, pembangunan manusia berakhlak mulia, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, pengelolaan kependudukan dan harmonisasi budaya multikultur, serta penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan social budaya.

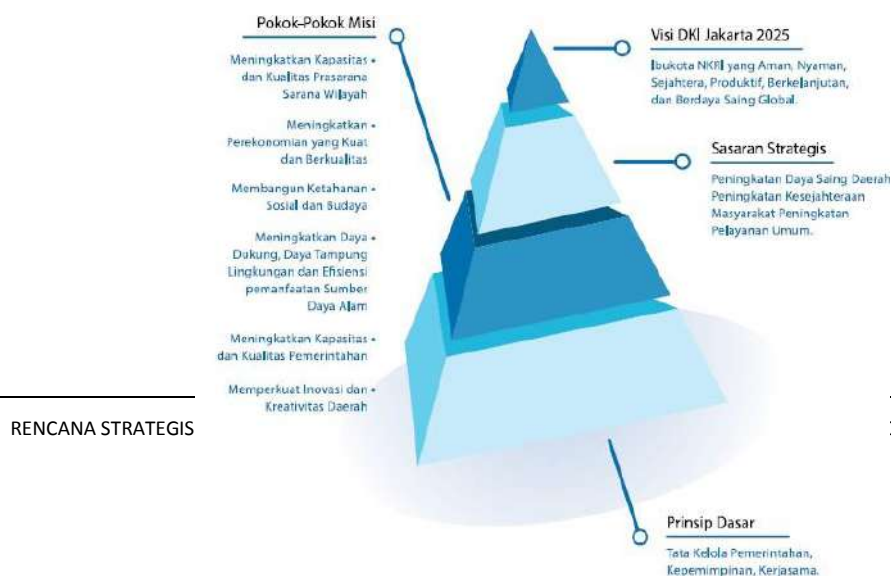
Misi Empat : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pelestarian lingkungan hidup difokuskan pada: pengendalian pemanfaatan penataan ruang yang berkualitas, penyediaan ruang terbuka hijau, penanganan banjir, kebakaran dan bencana lainnya serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pencegahan atas penurunan muka air tanah, pengendalian pencemaran lingkungan air udara dan tanah serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Misi Lima : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan,

peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional.

Misi Enam : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta. Dalam upaya melaksanakan pengembangan kemampuan daerah yang visioner dan berkualitas dalam penguatan inovasi dan kreasi daerah difokuskan pada:

- i) pengembangan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat.
- ii) pengembangan ekonomi kreatif, kluster unggulan daerah dan kewirausahaan berbasis teknologi
- iii) penguatan regulasi dan kebijakan pro inovasi dan kreasi
- iv) penguatan kapasitas dan kualitas pelaku industri kreatif
- v) penguatan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dan perwujudan institusi pengembangan inovasi, dan
- i) penyediaan sarana kota yang berkelanjutan.



Gambar 3.1 Rumusan Visi dan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025

Secara skematis rumusan misi dan fokus prioritas dapat dilihat pada Gambar 3.1. Visi dan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 selanjutnya menjadi pedoman Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Adapun dalam misi tersebut, di atas dengan memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang meliputi pengoordinasian seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro-Biro sesuai pembedangan Asisten Sekda, maka Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung pelaksanaan ke-3 misi yang tertuang dalam RPJPD tersebut serta sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya dari ke-5 misi tersebut, maka Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III.2
Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

No	Misi/Program	Penghambat	Pendorong
	Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan dan melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas		
Biro Pemerintahan			
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Belum optimalnya Kinerja penyelenggaraan	Target capaian Skor EKPPD

No	Misi/Program	Penghambat	Pendorong
		Pemerintahan Daerah	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-
Biro Hukum			
1	Program Penataan Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Masih kurangnya pemahaman mekanisme penyusunan produk hukum daerah dan substansi yang diusulkan ke Biro Hukum oleh perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah sehingga dalam pelaksanaan harmonisasi membutuhkan waktu lebih.	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan sebagai tanggung jawab bersama antara para perangkat daerah secara efektif dengan penyusunan produk hukum daerah terpadu dan berakhir di Biro Hukum - Pelaksanaan FGD dan konsultasi dengan perangkat daerah /unit kerja - Pembangunan penyusunan produk hukum daerah berbasis elektronik - Penambahan kualitas dan kuantitas SDM
2	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Serta Penanganan Perkara	Pembuktiaan dalam perkara aset di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta	Telah terbangunnya sistem Pendataan aset dan peningkatan koordinasi antara perangkat daerah
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			
1	Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.	Kurangnya SDM sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi secara maksimal	Pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan Anjab/ABK
Biro Kepala Daerah			
1	Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan dan melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas	Meningkatnya frekuensi dan kompleksitas acara Pimpinan Daerah dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas	Otonomi daerah memberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah
		Meningkatnya isu-isu global dan regional dalam rangka meningkatkan citra	Reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengarah kepada efektivitas dan efisiensi

No	Misi/Program	Penghambat	Pendorong
		dan daya saing kota Jakarta	pemanfaatan sumber daya
			Pengalaman empirik yang sangat memadai
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya faktor eksternal yaitu dengan adanya pandemic C19 terdapat kegiatan yang dilakukan refocusing - faktor internal yaitu kurang SDM dikarenakan purna bakti namun tidak diimbangi dengan rekrutmen pegawai yang seimbang sehingga formasi dan beban kerja yang terus meningkat tidak proporsional dengan jumlah SDM yang terus berkurang) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pula factor eksternal yaitu banyaknya pekerjaan yang sudah mengimplementasikan berbagai system dalam pelaksanaannya sehingga memudahkan proses pengerjaannya serta adanya koordinasi yang baik dengan UKPD di Lingkungan Setda) Factor Internal yaitu perencanaan anggaran yang semakin membaik serta koordinasi dan yang solid diantara PPTK di Lingkungan Biro Umum Setdaprov DKI Jakarta
Biro Kerja Sama Daerah			
1	Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.	Kurangnya SDM sehingga pelayanan dan kinerja tidak optimal	Penyesuaian kebutuhan pegawai dalam Anjab
Biro Perekonomian dan Keuangan			
1	Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.	<p>Kurangnya SDM sehingga pelayanan dan kinerja tidak optimal</p> <p>(terbatasnya SDM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mencoba rekrut dari SKPD lain - Penyesuaian kebutuhan pegawai dalam Anjab - Memaksimalkan Fungsi SDM yang tersedia
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup			
1	Program Kebijakan Administrasi	Terbatasnya Jumlah SDM	Memaksimalkan Fungsi SDM yang tersedia

No	Misi/Program	Penghambat	Pendorong
	Pembangunan		
Biro Kesejahteraan Sosial			
1	Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.	Kurangnya SDM sehingga pelayanan dan kinerja tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan penambahan pegawai dari CPNS dan menerima mutasi dari SKPD lainnya - Penyesuaian kebutuhan pegawai dalam Anjab
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual			
1	Program Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan urusan mental spiritual terbatas pada fasilitasi dan koordinasi - Sistem Informasi Mental Spiritual belum terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kolaborasi dengan lembaga mental spiritual <p style="text-align: center;">Transformasi Digital</p>

3.3 TELAAH RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis K/L dan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.3
Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Setda	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.4
Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan Telaah Rencana
Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Setda	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Setda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pembinaan urusan pemerintahan umum dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

a. Biro Pemerintahan

- 1) Kewenangan Daerah melalui undang-undang yang mengatur Jakarta;
- 2) Optimalisasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 3) Permasalahan tapal batas daerah;
- 4) Pedoman penataan lembaga kemasyarakatan;
- 5) Kedudukan dan kelembagaan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- 6) Menumbuh kembangkan kehidupan bermasyarakat yang patuh hukum, menjaga ketertiban umum, ketenteraman, dan penegakan hukum;
- 7) Memberikan jaminan hidup bagi warga Jakarta bebas dari ketakutan, pemaksaan, penindasan, ketidakadilan dan korban bencana alam atau buatan;
- 8) Menjunjung tinggi kehidupan demokrasi, berpendapat, terbuka peluang komunikasi yang luas dan menerima informasi yang benar;
- 9) Penegasan tugas dan fungsi, pola koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Serta Perindungan Masyarakat dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

- 10) Layanan pengaduan masyarakat yang terintegrasi dalam aplikasi Citizen Relation Management dilihat dari aspek kualitas tindak lanjut pengaduan oleh PD/UKPD dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber-sumber daya Lainnya
- 11) Layanan pengaduan masyarakat secara fisik / tatap muka

b. Biro Hukum

- 1) Deregulasi/penataan produk hukum daerah

c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

- 1) Penataan Organisasi
- 2) Penataan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- 3) Nilai PMPRB

d. Biro Kepala Daerah

- 1) Peningkatan pelayanan keprotokolan dan administrasi pimpinan daerah
- 2) Penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan tupoksi keprotokolan

e. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

- 1) Peningkatan pelayanan kerumahtanggaan (bangunan gedung, jaringan listrik, jaringan air dan telekomunikasi)
- 2) Peningkatan pelayanan pengamanan dalam Komplek Gedung Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan
- 3) Peningkatan pelayanan perlengkapan sarana acara Pimpinan dan pelayanan Balaikota di dalam dan di luar Komplek Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan
- 4) Peningkatan pelayanan administrasi Sekretaris Daerah, Deputi, Asisten Sekda dan Asisten Deputi
- 5) Peningkatan pelayanan kepuasan pelayanan administrasi keuangan PD/OPD

f. Biro Kerja Sama Daerah

- 1) Pemetaan potensi yang bisa dikerjasamakan baik dalam negeri, luar negeri dan pihak ketiga

- 2) Peningkatan Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perjalanan Dinas SKPD/UKPD
- 3) Penataan hubungan, kerjasama dan partisipasi daerah pada event dan organisasi internasional

g. Biro Perekonomian dan Keuangan

- 1) Jak Lingko - Integrasi Sistem Transportasi;
- 2) Energi Listrik Alternatif (Solar Panel);
- 3) Ease of Doing Business – Percepatan dan Kemudahan Perizinan melalui sistem online;
- 4) Penguatan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan PAD;
- 5) Inventarisasi/Sensus & Pemanfaatan Aset Daerah;
- 6) Peningkatan Fungsi dan Peran BUMD dalam Perekonomian Daerah;
- 7) Penguatan Sistem Informasi Ketahanan Pangan;
- 8) Pengendalian Inflasi Daerah, Perluasan Akses Keuangan Daerah, Perluasan Elektronifikasi-Digitalisasi Daerah;
- 9) Pengembangan JakPreneur;
- 10) Peningkatan Daya Saing UKM, IKM, dan Koperasi;
- 11) Optimalisasi Penataan Sarana dan Prasarana PKL; dan
- 12) Pemberian Dukungan ke UKM, IKM, dan Koperasi dalam rangka pemulihan pandemi Covid-19.

h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- 1) Implementasi pemanfaatan ruang dan penataan kawasan
- 2) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Kualitas Udara
- 3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 4) Koordinasi Pembangunan Infrastruktur
- 5) Pengendalian Kewajiban Fasos Fasum SIPPT
- 6) Pengembangan Sanitasi Lingkungan

i. Biro Kesejahteraan Sosial

- 1) Pembangunan Stadion Olahraga bertaraf internasional
- 2) Peningkatan kesejahteraan lansia melalui kartu lansia Jakarta (KLJ)
- 3) Pengentasan kemiskinan melalui integrasi bantuan sosial

- 4) Peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas
- 5) Perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 6) Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan integratif

j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

- 1) Penguatan peran tokoh agama dalam pembangunan mental spiritual
- 2) Peran Rumah Ibadah dan Lembaga Mental Spiritual untuk pemberdayaan umat
- 3) Pengintegrasian Pendidikan ke dalam kebudayaan dalam rangka membangun peradaban, pengembangan karakter generasi muda yang berbudaya
- 4) Penguatan pelayanan masyarakat bidang mental spiritual berbasis digital
- 5) Penguatan fungsi koordinasi dalam penyusunan kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan serta Mental Spiritual

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Tabel IV.I

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun			
				2023	2024	2025	2026
Biro Pemerintahan							
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, Dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	29.12	36.9	37.8	39.15
2		Percepatan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	3,300	4,047	4,128	4,211
Biro Hukum							
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Skor EKPPD	3,1	3,15	3,2	3,25
			Indeks Reformasi Birokrasi	2,3	2,5	2,8	3,2

			Peningkatan presentase regulasi yang harmonis	68	73	78	85
			Peningkatan presentase pemberian bantuan hukum dan peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia	68	73	78	85

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	68	73	75	78
			Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	91	91
			Nilai / Predikat AKIP	A	A	BB	A
			Skor EKPPD	3.1	3.15	3.23	3.25

Biro Kepala Daerah

1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	91%	91%	91%
			Indeks Kepuasan Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah	3,7	3,75	3,75	3,8

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80	85	90	100
---	--	---	---	----	----	----	-----

Biro Kerja Sama Daerah

1	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi AKIP						
		Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	50	55	60	70

			Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	50	55	60	70
Biro Perekonomian dan Keuangan							
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	36,9	37,8	39,15	40,73
		Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80	85	90	100
			Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100	100	100	100
		Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	92	93	94	95
		Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	4	4	5	5

		Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4,047	4,128	4,211	4,295
		Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	% Kerja Sama yang terimplementasi	50	55	60	70
			% Kolaborasi yang terimplementasi	50	55	60	70

Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup

1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi AKIP	36,9	37,8	39,15	40,73
		Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4,047	4,128	4,211	4,295
		Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80	85	90	100

Biro Kesejahteraan Sosial

1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP				
		Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4.047	4.128	4.211	4.295
		Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80	85	90	100
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100	100	100	100

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur		Indeks Reformasi Birokrasi	91			
---	--	--	-----------------------------------	-----------	--	--	--

		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Skor EKPPD	3,3			
			Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan dan Deregulasi Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	2			

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Sekretariat Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dijabarkan dalam tabel yang berisikan dari program-program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran sekretariat daerah. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah untuk tahun 2023-2026 dituangangkan dalam table berikut :

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Biro Pemerintahan			
TUJUAN 1 RPD :	Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
SASARAN 1 RPD :	Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, Dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penyelesaian masalah (setiap issue kecil yang berkembang dari sebuah issue besar yang tersaji-apa adanya dari sumber/lapangan) Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Biro Hukum			
TUJUAN 1 RPD :	Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
SASARAN 1 RPD :	Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan persentase regulasi yang harmonis	1. Melakukan Deregulasi /Penataan produk hukum daerah dalam bentuk harmonisasi dan evaluasi
			2. Meningkatkan nilai komponen penataan peraturan perundang-undangan dalam indeks Reformasi Birokrasi
		Peningkatan persentase pemberian bantuan hukum dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia	1. Melakukan peningkatan penyuluhan hukum bagi aparat maupun masyarakat, Pembinaan Hak Asasi Manusia serta pembentukan kelurahan sadar hukum dan kelompok sadar hukum serta meningkatkan pelayanan informasi perundang-undangan
			2. Melakukan peningkatan pelayanan informasi perundang-undangan
			3. Melakukan peningkatan penyelesaian sengketa dan penanganan perkara
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			
TUJUAN 1 RPD :	Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
SASARAN 1 RPD :	Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis
Biro Kepala Daerah			
TUJUAN 1 RPD :	Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
SASARAN 1 RPD :	Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah	Pemantapan kualitas organisasi pemerintah dengan Pemberian kewenangan dilakukan secara proposional sesuai dengan tugas dan fungsinya
		Peningkatan pengelolaan pelayanan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai.	
		Peningkatan pengelolaan pelayanan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai.	
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah			
TUJUAN 1 RPD :	Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
SASARAN 1 RPD :	Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Dukungan teknis, Administrasi dan Analisis	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian	Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	Pemantapan kualitas organisasi pemerintah dengan Pemberian kewenangan dilakukan secara proposional sesuai dengan tugas dan fungsinya
Biro Kerja Sama Daerah			
TUJUAN 1 RPD :	Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
SASARAN 1 RPD :	Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN

Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi AKIP	FASILITASI DAN EVALUASI	1. Strategi 1.1	1. Arah Kebijakan 1.1
	PENYELENGGARAAN KOLABORASI DAN KERJA SAMA DAERAH	2. Strategi 1.2	2. Arah Kebijakan 1.2
Biro Perekonomian dan Keuangan			
TUJUAN 1 RPD :	Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
SASARAN 1 RPD :	Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan	1. Arah Kebijakan 1.1
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan	1. Arah Kebijakan 2.1
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup			
TUJUAN RPD :	Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
SASARAN RPD :	Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	

Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan

Biro Kesejahteraan Sosial

TUJUAN RPD : Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

SASARAN RPD : Perbaiki Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	Peningkatan kualitas layanan pimpinan dan pengadministrasian
	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dan Bidang Sosial Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

TUJUAN RPD : Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

SASARAN RPD : Perbaiki Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	-

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program/ kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan rencana pembangunan daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terdapat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk periode 5 (lima) tahunan semenjak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dijabarkan kedalam matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah terdiri dari 8 Program dan 24 Kegiatan.

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026

1. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Fasilitasi Kerja Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
2. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Bantuan Hukum
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
 - Fasilitasi Keprotokolan
4. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 - Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah
5. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
- Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
6. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
7. PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
8. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
- Fasilitasi Kerja Sama Daerah



Tabel V.I

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah				Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	29,12	Nilai	36,90	1.379.394.411.280	37,80	1.478.716.973.658	39,15	1.602.504.648.354	40,73	1.740.129.505.882	SEKR ETAR IAT DAE RAH
	Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah			% Kerja Sama yang terimplemtasi	41,3	Persentase	50		55		60		70		SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
				% Kolaborasi yang terimpleme ntasi	41,3	Persenta se	50		55		60		70		SEKR ETAR IAT DAE RAH
			PROGR AM PENAT AAN ORGAN ISASI	Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Terimplem entasi	0	Persenta se	50	8.786.326.934	50	4.264.255.657	60	4.369.976.833	60	4.906.270.546	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.02 .2.04	Fasilita si Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Fasilitasi Kerjasama Daerah	1	Laporan	2	8.786.326.934	2	4.264.255.657	2	4.369.976.833	2	4.906.270.546	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.02 .2.04.0 1	Fasilita si Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	Dokumen	2	8.410.535.234	2	3.688.463.757	2	3.994.185.133	2	4.330.478.646	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.02 .2.04.0 2	Fasilita si Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1	Dokumen	2	375.791.700	2	575.791.900	2	375.791.700	2	575.791.900	SEKR ETAR IAT DAE RAH
	Penataan , Penyusun an, dan Harmonis asi Produk Hukum Daerah			Indeks Kualitas Kebijakan Pembentuk an Produk Hukum Daerah	0	Indeks	2	4.084.984.021	2,30	4.726.234.021	2,50	5.094.684.021	2,80	5.194.684.021	SEKR ETAR IAT DAE RAH
			PROGR AM FASILIT ASI DAN KOORD INASI HUKU M	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangka n	100	Persenta se	100	4.084.984.021	90	4.726.234.021	80	5.094.684.021	70	5.194.684.021	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
				Persentase Penanganan Perkara Litigasi yang diselesaikan	100	Persen	100	4.084.984.021	100	4.726.234.021	100	5.094.684.021	100	5.194.684.021	SEKR ETAR IAT DAE RAH
				Persentase Penanganan Perkara Non Litigasi yang diselesaikan	100	Persen	100	4.084.984.021	100	4.726.234.021	100	5.094.684.021	100	5.194.684.021	SEKR ETAR IAT DAE RAH
				Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	80	Persenta se	85	4.084.984.021	90	4.726.234.021	95	5.094.684.021	100	5.194.684.021	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.05 .1.01	Fasilita si Penyus unan Perund ang- Undan gan	Persentase Produk Hukum yang diharmonisasi Sesuai Target Propempergub	100	Persen	100	1.429.996.014	100	1.429.996.014	100	1.429.996.014	100	1.429.996.014	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.05 .1.01.0 1	Fasilita si Penyus unan Produk Hukum Pengat uran	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	105	Dokumen	100	488.400.000	95	488.400.000	90	488.400.000	85	488.400.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.05 .1.01.0 2	Fasilita si Penyus unan Produk Hukum Peneta pan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1500	Dokumen	1500	96.600.000	1500	96.600.000	1500	96.600.000	1500	96.600.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.05 .1.01.0 3	Pendok ument asian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainny a	Jumlah Produk Hukum yang Didokumen tasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	100	Dokumen	150	844.996.014	200	844.996.014	250	844.996.014	300	844.996.014	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.05 .1.02	Fasilita si Bantua n Hukum	Persentase Pelaksanaa n Fasilitasi Bantuan Hukum	100	Persen	100	2.654.988.007	100	3.296.238.007	100	3.664.688.007	100	3.764.688.007	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.05 .1.02.0 1	Fasilita si Penyel esaian Masala h Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaika n	40	Kasus	40	2.093.388.007	40	2.634.638.007	40	2.903.088.007	40	2.903.088.007	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.05 .1.02.0 2	Fasilita si Penyel esaian Masala h Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaika n	40	Kasus	44	561.600.000	46	661.600.000	48	761.600.000	50	861.600.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
	Peningka tan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadm inistrasia n Sekretari at Daerah			Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80	persenta se	80	915.181.333.937	85	994.674.871.940	90	1.086.965.999.332	100	1.188.978.114.786	SEKR ETAR IAT DAE RAH
				Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100	Persenta se	100	915.181.333.937	100	994.674.871.940	100	1.086.965.999.332	100	1.188.978.114.786	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
			PROGR AM PENUN JANG URUSA N PEMER INTAH AN DAERA H PROVI NSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	0	Indeks	4	915.181.333.937	4	994.674.871.940	4	1.086.965.999.332	4	1.188.978.114.786	SEKR ETAR IAT DAE RAH
				Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administras i Umum dan Kerumahta nggaan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan	4	Indeks	4	915.181.333.937	4	994.674.871.940	4	1.086.965.999.332	4	1.188.978.114.786	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
				Indeks Kepuasan Layanan Keprotokol an, Administras i dan Komunikasi Pimpinan Daerah	4	Indeks	4	915.181.333.937	4	994.674.871.940	4	1.086.965.999.332	4	1.188.978.114.786	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.02	Admini strasi Keuang an Perang kat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administras i Keuangan	4	Indeks	4	711.294.721.088	4	782.423.728.097	4	860.665.320.406	4	946.731.031.422	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.02.0 1	Penyed iaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	627	Orang/ Bulan	643	711.263.280.088	668	782.389.608.097	688	860.628.568.906	718	946.691.425.797	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.02.0 3	Pelaksa naan Penata usahaa n dan Penguji an/Veri fikasi Keuang an SKPD	Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0	Dokumen	1	31.441.000	1	34.120.000	1	36.751.500	1	39.605.625	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.05	Admini strasi Kepega waian Perang kat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawai an	0	Indeks	4	1.102.936.011	4	1.211.034.079	4	1.333.401.953	4	1.447.649.595	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.05.0 2	Pengad aan Pakaia n Dinas Beserta Atribut Kelengk apannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa n	0	Paket	1	1.102.936.011	1	1.211.034.079	1	1.333.401.953	1	1.447.649.595	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.06	Admini strasi Umum Perang kat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administras i Umum	4	Indeks	4	14.445.405.472	4	15.542.842.889	4	16.997.350.097	4	18.155.582.375	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.06.0 1	Penyed iaan Kompo nen Instala si Listrik/ Penera ngan Bangun an Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	1	425.851.195	1	638.762.149	1	532.301.791	1	553.593.862	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.06.0 2	Penyed iaan Peralat an dan Perlen gkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	0	Paket	1	2.045.684.748	1	2.180.475.563	1	2.299.812.752	1	2.442.659.605	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.06.0 3	Penyed iaan Peralat an Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket	1	19.463.944	1	8.605.462	1	44.675.898	1	16.657.503	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.06.0 4	Penyed iaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	Paket	1	3.934.619.783	1	4.315.104.185	1	4.737.493.798	1	5.201.843.388	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.06.0 5	Penyed iaan Barang Cetaka n dan Penggaa ndaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	0	Paket	1	690.140.338	1	714.759.128	1	751.914.978	1	795.500.138	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.06.0 7	Penyed iaan Bahan/ Materi al	Jumlah Paket Bahan/Mat erial yang Disediakan	0	Paket	1	1.723.790.750	1	1.723.790.750	1	2.162.769.750	1	2.212.769.750	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.06.0 8	Fasilita si Kunjun gan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	Laporan	1	1.582.946.912	1	1.569.738.960	1	1.627.491.103	1	1.706.457.151	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.06.0 9	Penyel enggar aan Rapat Koordi nasi dan Konsult asi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	Laporan	12	3.791.145.800	12	4.150.557.090	12	4.595.553.445	12	4.979.675.567	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.06.1 0	Penata usahaa n Arsip Dinami s pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD	0	Dokumen	1	126.980.000	1	135.280.000	1	138.530.000	1	138.530.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.06.1 1	Dukun gan Pelaksa naan Sistem Pemerin tahan Berbasi s Elektro nik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	1	104.782.002	1	105.769.602	1	106.806.582	1	107.895.411	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.07	Pengad aan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemer intah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggar an yang Efisien	4	Indeks	4	5.511.394.763	4	5.686.551.132	4	6.607.110.600	4	6.866.367.951	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.07.0 6	Pengad aan Peralat an dan Mesin Lainny a	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	195	5.236.394.763	134	5.241.551.132	207	6.095.360.600	151	6.252.267.951	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.07.1 1	Pengad aan Sarana dan Prasara na Penduk ung Gedun g Kantor atau Bangun an Lainny a	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	50	275.000.000	60	445.000.000	65	511.750.000	70	614.100.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.08	Penyed iaan Jasa Penunj ang Urusan Pemer ntahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerint ah Daerah	4	Indeks	4	68.198.160.555	4	74.547.402.596	4	81.538.260.291	4	89.250.077.556	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.08.0 1	Penyed iaan Jasa Surat Menyu rat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	135.084.148	12	135.084.148	12	135.084.148	12	135.084.148	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.08.0 2	Penyed iaan Jasa Komm unikasi, Sumbe r Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	Laporan	12	29.231.692.299	12	32.124.313.529	12	35.306.196.882	12	38.806.268.570	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.08.0 3	Penyed iaan Jasa Peralat an dan Perlen gkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	0	Laporan	12	3.211.790.433	12	3.426.638.707	12	3.664.742.821	12	3.941.970.417	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.08.0 4	Penyed iaan Jasa Pelaya nan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	35.619.593.675	12	38.861.366.212	12	42.432.236.440	12	46.366.754.421	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.09	Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemer intahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	4	Indeks	4	18.204.059.307	4	17.612.562.070	4	16.321.113.236	4	17.165.886.751	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.09.0 2	Penyed iaan Jasa Pemeli haraan , Biaya Pemeli haraan , Pajak dan Perizin an Kendar aan Dinas Operas ional atau Lapang an	Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	139	Unit	119	1.604.924.166	119	1.664.924.166	125	1.799.554.400	125	1.859.554.400	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.09.0 6	Pemeli haraan Peralat an dan Mesin Lainny a	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124	Unit	226	462.933.890	226	510.473.046	231	564.716.054	231	625.938.890	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.09.0 9	Pemeli haraan /Rehab ilitasi Gedun g Kantor dan Bangun an Lainny a	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	13	Unit	13	9.100.470.343	13	9.533.604.822	13	9.955.751.634	13	10.448.917.065	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.09.1 1	Pemeli haraan /Rehab ilitasi Sarana dan Prasara na Penduk ung Gedun g Kantor atau Bangun an Lainny a	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	318	Unit	338	7.035.730.908	338	5.903.560.036	338	4.001.091.148	338	4.231.476.396	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.11	Admini strasi Keuang an dan Operas ional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	Indeks	4	72.586.486.304	4	72.586.486.304	4	76.210.054.119	4	80.014.656.412	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.11.0 1	Penyed iaan Gaji dan Tunjan gan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bu lan	2	72.586.486.304	2	72.586.486.304	2	76.210.054.119	2	80.014.656.412	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.12	Fasilita si Kerum ahtang gaan Sekreta riat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kerumahta nggaan Sekretariat Daerah	4	Indeks	4	9.757.869.436	4	10.706.826.889	4	12.543.878.123	4	13.597.090.405	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.12.0 1	Penyed iaan Kebutu han Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5	Paket	3	2.458.196.720	3	2.458.196.720	3	2.458.196.720	3	2.262.435.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.12.0 2	Penyed iaan Kebutu han Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	Paket	0	-	0	-	3	749.400.000	3	749.400.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.12.0 3	Penyed iaan Kebutu han Rumah Tangga Sekreta riat Daerah	Jumlah Paket Kebutu han Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0	Paket	1	7.299.672.716	1	8.248.630.169	1	9.336.281.403	1	10.585.255.405	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.13	Fasilita si Materi dan Komon ikasi Pimpin an	Indeks Kepuasan Penyediaan Materi dan Komunikasi Pimpinan	4	Indeks	4	495.818.000	4	495.818.000	4	495.818.000	4	495.818.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.13.0 1	Penyia pan Materi Pimpin an	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	1034	Dokumen	400	393.600.000	400	393.600.000	700	393.600.000	700	393.600.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.13.0 2	Fasilita si Komon ikasi Pimpin an	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	12	102.218.000	12	102.218.000	12	102.218.000	12	102.218.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.14	Fasilita si Keprot okolan	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokol an	4	Indeks	4	13.584.483.001	4	13.861.619.884	4	14.253.692.507	4	15.253.954.319	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.14.0 1	Fasilita si dan Koordi nasi Pelaksa naan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaa n Acara	0	Laporan	12	11.268.414.231	12	12.413.059.284	12	12.805.131.907	12	13.514.704.469	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.01 .1.14.0 2	Fasilita si Kunjun gan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Laporan	12	1.327.043.020	12	526.834.850	12	526.834.850	12	817.524.100	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.01 .1.14.0 3	Pengel olaan Hubun gan Keprot okolan	Jumlah Laporan Pengelolaa n Hubungan Keprotokol an	12	Laporan	12	989.025.750	12	921.725.750	12	921.725.750	12	921.725.750	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
	Perbaik an Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisa si Perangka t Daerah yang Dinamis			Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	91,57	Persen	92	674.438.155	93	742.881.971	94	820.130.168	95	900.763.184	SEKR ETAR IAT DAE RAH
			PROGR AM PENAT AAN ORGAN ISASI	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi	7.03	Nilai	7.16	674.438.155	7.2	742.881.971	7.24	820.130.168	7.28	900.763.184	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
				Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan Tata Laksana dan Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik	11.83	Nilai	12.11	674.438.155	12.12	742.881.971	12.13	820.130.168	12.14	900.763.184	SEKR ETAR IAT DAE RAH
				Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Manajeme n Perubahan	4.82	Nilai	4.83	674.438.155	4.85	742.881.971	4.88	820.130.168	4.9	900.763.184	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.02 .1.01	Fasilita si Kelemb agaan dan Analisis Jabata n	Persentase Perangkat Daerah yang berada pada peringkat komposit P- 4	0	persen	23.8	119.570.000	47.6	131.527.000	71.4	144.679.700	100	159.147.670	SEKR ETAR IAT DAE RAH
				Persentase Perangkat Daerah yang terverifikasi dokumen Anjab dan ABK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku	0	Persen	23.8	119.570.000	47.6	131.527.000	71.4	144.679.700	100	159.147.670	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.02 .1.01.0 1	Fasilita si Penata an Kelemb agaan Provins i	Jumlah Dokumen Hasil Penata an Kelembaga an Kabupaten/ Kota	0	Dokumen	1	86.900.000	1	95.590.000	1	105.149.000	1	115.663.900	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.02 .1.01.0 3	Penata an Analisis Jabata n	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	0	Dokumen	1	32.670.000	1	35.937.000	1	39.530.700	1	43.483.770	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.02 .1.02	Fasilita si Reform asi Birokra si dan Akunta bilitas Kinerja	Nilai rata- rata PMPRB Perangkat Daerah	91.71	Persen	95.5	554.868.155	96	611.354.971	96.5	675.450.468	97	741.615.514	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.02 .1.02.0 1	Pembi naan Pelaksa naan Reform asi Birokra si	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Reformasi Birokrasi	2	Dokumen	2	232.760.000	2	256.036.000	2	281.639.600	2	309.803.560	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.02 .1.02.0 2	Monito ring dan Evaluas i Akunta bilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilit as Kinerja	1	Dokumen	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.02 .1.02.0 3	Evaluas i Pelaksa naan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaa n Budaya Kerja	0	Laporan	1	69.000.000	1	74.400.000	1	82.800.000	1	88.200.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.02 .1.02.0 4	Pengel olaan Tatalak sana Pemer intahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Tata Laksana Pemerintah an	1	Dokumen	1	97.020.000	1	106.722.000	1	117.394.200	1	129.133.620	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.02 .1.02.0 5	Fasilita si Pening katan Pelaya nan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkata n Pelayanan Publik	1	Dokumen	1	131.088.155	1	144.196.971	1	158.616.668	1	174.478.334	SEKR ETAR IAT DAE RAH
	Percepat an, Pengend alian, dan Evaluasi Pelaksan aan Kebijakan Pembang unan			Skor EKPPD	0	Skor	4,047	450.667.328.233	4,128	474.308.730.069	4,211	505.253.858.000	4,295	540.149.673.345	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
			PROGR AM KEBIJA KAN ADMIN ISTRASI PEMBA NGUN AN	Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan	100	%	100	260.299.145	100	267.458.198	100	274.975.204	100	282.868.060	SEKR ETAR IAT DAE RAH
				Persentase Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	80	%	80	260.299.145	80	267.458.198	80	274.975.204	80	282.868.060	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
				Persentase Upaya Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	30	%	30	260.299.145	35	267.458.198	40	274.975.204	45	282.868.060	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.08 .1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase terkendali ya administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan	100	Persenta se	100	143.181.065	100	150.340.118	100	157.857.124	100	165.749.980	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.08 .1.01.0 1	Pengen dalian Admini strasi Pelaksa naan Pemba ngunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendali an Administras i Pelaksanaa n Pembangu nan APBD	12	Laporan	12	143.181.065	12	150.340.118	12	157.857.124	12	165.749.980	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.08 .1.02	Pelapo ran Pelaksa naan Pemba ngunan Daerah	Persentase Laporan Hasil Pemantaua n yang diselesaika n Tepat Waktu	100	Persenta se	100	117.118.080	100	117.118.080	100	117.118.080	100	117.118.080	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.08 .1.02.0 2	Pelapo ran Pelaksa naan Pemba ngunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Pembangu nan Daerah	0	Laporan	4	117.118.080	4	117.118.080	4	117.118.080	4	117.118.080	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
			PROGR AM KESEJA HTERA AN RAKYA T	Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi , evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahtera an rakyat di bawah Koordinasi Biro Kesejahtera an Sosial	4	Indeks	4	358.926.230.968	4	370.148.272.113	4	381.553.619.430	4	393.169.768.845	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
				Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi , evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahtera an rakyat di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	4	Indeks	4	358.926.230.968	4	370.148.272.113	4	381.553.619.430	4	393.169.768.845	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.04 .1.01	Fasilita si Pembina an Mental Spiritu al	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Mental Spiritual	4	indeks	4	358.390.230.968	4	369.612.272.113	4	381.017.619.430	4	392.633.768.845	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.04 .1.01.0 2	Fasilita si Kelemb agaan Bina Spiritu al	Jumlah Lembaga Bina Spiritu al yang Difasilitasi	100	Lembaga	167	358.390.230.968	189	369.612.272.113	210	381.017.619.430	231	392.633.768.845	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.04 .1.02	Fasilita si Penge mbang an Keseja hteraa n Rakyat Pelaya nan Dasar	Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengemban gan kesejahtera an rakyat pelayanan dasar di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	4	Indeks	4	281.120.000	4	281.120.000	4	281.120.000	4	281.120.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
				Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengemban gan kesejahtera an rakyat pelayanan dasar di bawah koordinasi Biro Kesejahtera an Sosial	4	Indeks	4	281.120.000	4	281.120.000	4	281.120.000	4	281.120.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.04 .1.02.0 1	Fasilita si, Koordi nasi, Sinkron isasi, Evaluas i dan Capaian Kinerja Kebijak an Keseja htheraa n Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahtera an Rakyat Bidang Pendidikan	18	Dokumen	18	124.480.000	18	124.480.000	18	124.480.000	18	124.480.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.04 .1.02.0 2	Fasilita si, Koordi nasi dan Sinkron isasi, Evaluas i dan Capaian Kinerja Kebijak an Keseja hteraa n Rakyat Bidang Keseha tan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahtera an Rakyat Bidang Kesehatan	13	Dokumen	13	111.580.000	13	111.580.000	13	111.580.000	13	111.580.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.04 .1.02.0 3	Fasilita si, Koordi nasi dan Sinkron isasi, Evaluas i dan Capaian Kinerja Kebijak an Keseja hteraa n Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahtera an Rakyat Bidang Sosial	8	Dokumen	8	45.060.000	8	45.060.000	8	45.060.000	8	45.060.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.04 .1.03	Fasilita si Penge mbang an Keseja hteraa n Rakyat Non Pelaya nan Dasar	Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengemban gan kesejahtera an rakyat non pelayanan dasar di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	4	Indeks	4	254.880.000	4	254.880.000	4	254.880.000	4	254.880.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
				Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan Kesejahteraan Rakyat non pelayanan dasar di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	4	Indeks	4	254.880.000	4	254.880.000	4	254.880.000	4	254.880.000	SEKRETARIAT DAERAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.04 .1.03.0 1	Koordi nasi dan Sinkron isasi Kebijak an Keseja htheraa n Rakyat Bidang Kepem udaan, Olahra ga, Kebuda yaan, dan Pariwis ata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahtera an Rakyat Bidang Kepemudaa n, Olahraga, Kebudayaa n, dan Pariwisata	21	Dokumen	21	156.460.000	21	156.460.000	21	156.460.000	21	156.460.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.04 .1.03.0 2	Koordi nasi dan Sinkron isasi Kebijak an Keseja hteraan Rakyat Bidang Pemberdayaa n Perem puan dan Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendu duk dan Keluarg a Berenc ana, Admini strasi Kepen duduka n dan Pencat atan Sipil, Pembe rdayaa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana, Administras i Kependudu kan dan Pencatatan Sipil, Pemberday aan Masyarakat dan Desa, Transmigra si dan Tenaga Kerja	8	Dokumen	8	98.420.000	8	98.420.000	8	98.420.000	8	98.420.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
			PROGR AM PEMER INTAH AN DAN OTON OMI DAERA H	Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplem entasi	0	Persenta se	50	91.332.298.120	50	103.737.074.758	50	123.261.542.116	60	146.525.129.127	SEKR ETAR IAT DAE RAH
				Indeks Kepuasan Layanan Adminstras i dan Keuangan Perjalanan Dinas	0	Indeks	4	91.332.298.120	4	103.737.074.758	4	123.261.542.116	4	146.525.129.127	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
				Persentase Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pemerintah dan Otonomi Daerah	90	Persen	91	91.332.298.120	92	103.737.074.758	93	123.261.542.116	94	146.525.129.127	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.03 .1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fasilitas Perjalanan Dinas	0	Indeks	4	83.357.018.416	4	99.231.307.755	4	118.223.092.728	4	140.951.644.224	SEKR ETAR IAT DAE RAH
				Persentase Penyelesaian Kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	90	Persen	91	83.357.018.416	92	99.231.307.755	93	118.223.092.728	94	140.951.644.224	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.03 .1.01.0 1	Pengel olaan Admini strasi Kebijak an Pemerin tahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Administras i Kebijakan Pemerintah an	0	Dokumen	3	5.940.569.579	3	6.368.290.589	3	6.826.807.511	3	7.318.337.652	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.03 .1.01.0 2	Fasilita si Pelaksa naan Pemerin tahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaa n Pemerintah an Umum	0	Dokumen	4	77.153.362.600	4	92.580.988.720	4	111.093.950.723	4	133.309.203.994	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.03 .1.01.0 3	Fasilita si Penata an Wilaya h	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	0	Dokumen	3	263.086.237	3	282.028.446	3	302.334.494	3	324.102.578	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.03 .1.02	Pelaksa naan Otono mi Daerah	Persentase Penyelesaia n Kebijakan Pelaksanaa n Otonomi Daerah	90	Persen	91	6.423.434.704	92	2.453.922.003	93	2.486.604.388	94	2.521.639.903	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.03 .1.02.0 2	Penge mbang an Otono mi dan Penata an Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengemban gan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksana n	0	Dokumen	4	6.201.107.200	3	2.215.586.918	3	2.231.109.177	3	2.247.749.037	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.03 .1.02.0 3	Evaluas i dan Penyel enggar aan Pemer intahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyeleng garan Pemerintah an	2	Laporan	1	222.327.504	1	238.335.085	1	255.495.211	2	273.890.866	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.03 .1.03	Fasilita si Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Fasilitasi Kerjasama Daerah	1	Laporan	2	8.786.326.934	2	4.264.255.657	2	4.369.976.833	2	4.906.270.546	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.03 .1.03.0 1	Fasilita si Kerja Sama Antar Pemerin tah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	0	Dokumen	2	1.551.845.000	2	2.051.845.000	2	2.551.845.000	2	3.051.845.000	SEKR ETAR IAT DAE RAH
			PROGR AM PEREK ONOMI AN DAN PEMBA NGUN AN	Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan	100	%	100	148.500.000	100	155.925.000	100	163.721.250	100	171.907.313	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
		4.01.06 .1.01	Pengel olaan Kebijak an dan Koordi nasi Pereko nomia n	Persentase Rekomenda si kebijakan bidang perekonom ian dan keuangan yang disampaika n kepada pimpinan	100	Persenta se	100	148.500.000	100	155.925.000	100	163.721.250	100	171.907.313	SEKR ETAR IAT DAE RAH
		4.01.06 .1.01.0 1	Fasilita si Pengel olaan Kebijak an Ekono mi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Kebijakan Ekonomi Makro	2	Dokumen	2	148.500.000	2	155.925.000	2	163.721.250	2	171.907.313	SEKR ETAR IAT DAE RAH
Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sitem Merit				Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	279,53	Nilai	295,03	2.610.283.333.876	304,53	6.813.381.509.697	304,53	8.880.649.338.986	314,53	10.327.749.888.226	SEKR ETAR IAT DAE RAH



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGR AM, KEGIAT AN DAN SUB KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PER ANG KAT DAE RAH
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	
	Peningka tan Profesion alitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara			Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionali tas ASN	42,12	Nilai	43,30	2.610.283.333.876	44,20	6.813.381.509.697	45,10	8.880.649.338.986	46,00	10.327.749.888.226	SEKR ETAR IAT DAE RAH

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, yang ditampilkan tabel dalam lampiran VII dalam buku ini.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 0	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9	
Biro Pemerintahan								
1	Persentase penyelesaian masalah (setiap issue kecil yang berkembang dari sebuah issue besar yang tersaji-apa adanya dari sumber/lapangan) Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90	90	91	92	93	94	
2	Persentase penyelesaian kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	90	90	91	92	93	94	

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 0	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	9
3	Persentase penyelesaian kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah	90	90	91	92	93	94
Biro Hukum							
1	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	0	2	2,3	2,5	2,8	2,8
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi							
1	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi	7,03	7,16	7,2	7,24	7,28	7,28
2	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	11,83	12,11	12,12	12,13	12,14	12,14
3	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Manajemen Perubahan	4,82	4,83	4,85	4,88	4,9	4,9
4	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	4	4	4	4	4
Biro Kepala Daerah							
1	Indeks kepuasan pelayanan keprotokolan dan administrasi Pimpinan Daerah	3,7	3,7	3,75	3,75	3,8	3,8
2	indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4
3	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	4	4	4	4	4
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah							

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 0	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80	80	85	90	100	100
Biro Kerjasama Daerah							
1	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	0	50	55	60	70	70
2	Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	0	50	55	60	70	70
Biro Perekonomian dan Keuangan							
1	Persentase terkendalinya administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan	12	12	12	12	12	12
2	Persentase Rekomendasi kebijakan bidang perekonomian dan keuangan yang disampaikan kepada pimpinan	2	2	2	2	2	2
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	4	4	4	4	4
2	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	0	4	4	4	4	4

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 0	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	9
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	0	4	4	4	4	4
4	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	0	4	4	4	4	4
5	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	4	4	4	4	4
6	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	4	4	4	4	4
7	Persentase Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	0	80	80	80	80	80
8	Persentase Upaya Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	0	30	35	40	45	45
9	Persentase Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan Tepat Waktu	0	100	100	100	100	100
Biro Kesejahteraan Sosial							
1	Skor EKPPD	3.30	4.047	4.128	4.211	4.295	4.295

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 0	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	9
2	Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat lingkup kesejahteraan rakyat dibawah Koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	4	4	4	4	4	4
3	Indeks Kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kebijakan Kesejahteraan rakyat pelayanan Dasar lingkup dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	4	4	4	4	4	4
4	Indeks Kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Non Dasar lingkup dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	4	4	4	4	4	4
5	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	4	4
6	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	4	4	4	4	4
7	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 0	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	9
8	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	4	4	4	4	4	4
9	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	4	4
10	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	4	4
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual							
1	Nilai komponen pengukuran dan pelaporan pada evaluasi AKIP	-					
2	Skor EKPPD	-					
3	Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	4	4	4	4	4	4
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Mental Spiritual	4	4	4	4	4	4
5	Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	4	4	4	4	4	4

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 0	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9	
6	Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	4	4	4	4	4	4	
7	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	4	4	
8	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	4	4	4	4	4	
9	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4	
10	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	4	4	4	4	4	4	
11	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	4	4	
12	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	4	4	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah yaitu untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah.

Demi tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah, maka perlu dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan, dan hasil kinerja Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.